|  |
| --- |
| **SIARAN PERS**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |

**BPK BERI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN UNTUK PERTAMA KALINYA**

**ATAS LKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA 2017**

**Pangkalpinang, Kamis (31 Mei 2018)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran (TA) 2017. Pemeriksaan terhadap LKPD Pemerintah Provinsi TA 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pelaksanaan APBD TA 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 tersebut disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang pada hari ini (31/5).

Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, **Arif Agus** menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini meningkat dari opini tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan merupakan opini WTP pertama yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang dimuat dalam temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan. Temuan SPI diantaranya adalah kegiatan penyelesaian draft rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan, pelaporan dan penatausahaan jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, dan jaminan pasca tambang, pencatatan aset tetap dan aset lainnya dan barang milik daerah pada rumah negara KDH dan WKDH. Temuan Kepatuhan diantaranya adalah kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang jasa dan kekurangan volume pekerjaan fisik jalan, jembatan dan gedung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2017.

**BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**